

# PERAN PENDIDIKAN DALAM MEMPERCEPAT PERTUMBUHAN EKONOMI BANGSA

Sri Haryati (FKIP-UTM)

## ***ABSTRACT***

*In the last few decades, education in Indonesia is interpreted as a development sector which does not have direct impact on economic growth. That is why, not like other countries, Indonesian government is not serious in making education a development priority. This paper is an effort to clarify that education directly influences human capital productivity, in which it is a vital component of a country's economic growth.*

**Key Words :** *education, economic growth, human capital, productivity*

### **A. PENDAHULUAN**

Selama beberapa dekade terakhir, pendidikan lebih banyak dipahami sebagai bentuk pelayanan sosial negara atau badan penyelenggara lain yang harus diberikan kepada masyarakat. Pendidikan dianggap tidak memberikan dampak langsung bagi perekonomian masyarakat, sehingga pembangunan pendidikan tidak terlalu menarik untuk dijadikan tema utama pembangunan. Pendidikan lebih merupakan sektor yang menyerap anggaran.

Ketidakyakinan ini termanifestasikan misalnya dalam kecilnya komitmen pemerintah atas anggaran untuk sektor pendidikan. Mengalokasikan anggaran untuk sektor pendidikan dianggap membuang-buang uang yang tidak bermanfaat secara

ekonomis. Akibatnya alokasi anggaran sektor pendidikanpun biasanya merupakan sisa setelah yang lain terlebih dahulu, terutama sektor fisik. Apalagi hal tersebut dipicu oleh adanya krisis ekonomi di Indonesia akhir-akhir ini.

Krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia saat ini memiliki jaringan sebab-akibat yang sangat rumit. Banyak sekali variabel yang ikut berpengaruh baik dalam proses munculnya maupun lamanya pemulihan krisis. **Isu-isu yang berkembang mulai dari *capital flight* ke luar negeri; suburnya korupsi, kolusi, dan nepotisme; banyaknya hutang swasta yang jatuh tempo; hingga fundamental ekonomi yang ternyata tidak kokoh dengan bertumpu pada ekonomi konglomerasi, merupakan bagian dari benang kusut penyebab krisis. Titik balik dari berbagai isu tersebut adalah populernya isu "ekonomi kerakyatan" dengan pemihakan kepada koperasi dan pengusaha kecil dan menengah.**

Sebenarnya banyak variabel yang turut memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi. Nafziger (1984) menyebutkan enam variabel, yaitu: (1) sumber daya alam, (2) jumlah penduduk, (3) tenaga kerja, migrasi dan urbanisasi, (4) pengembangan sumber daya manusia, (5) formasi kapital, pilihan investasi dan kemajuan teknologi, serta (6) kewirausahaan, organisasi dan inovasi.

#### **B. Pendidikan sebagai Investasi Jangka Panjang**

Profesor Toshiko Kinoshita (Kompas, 24 Mei 2008) mengemukakan bahwa sumber daya manusia Indonesia masih sangat lemah untuk mendukung perkembangan industri dan ekonomi. Penyebab utamanya adalah karena pemerintah selama ini tidak pernah menempatkan pendidikan sebagai

prioritas terpenting. Bangsa dan masyarakat Indonesia, mulai dari yang awam hingga politisi dan pejabat pemerintah, lebih banyak mengejar uang untuk memperkaya diri dan kurang berfikir panjang.

Pendapat Guru Besar Universitas Waseda Jepang tersebut sangat menarik untuk dikaji mengingat saat ini pemerintah Indonesia mulai melirik pendidikan sebagai investasi jangka panjang, setelah selama ini pendidikan terabaikan. Salah satu indikatornya adalah telah disetujuinya oleh MPR untuk memprioritaskan anggaran pendidikan minimal 20 % dari APBN atau APBD. Langkah ini merupakan awal kesadaran pentingnya pendidikan sebagai investasi jangka panjang. Sedikitnya terdapat tiga alasan untuk memprioritaskan pendidikan sebagai investasi jangka panjang.

**Pertama**, pendidikan adalah alat untuk perkembangan ekonomi dan bukan sekedar pertumbuhan ekonomi. Pada praksis manajemen pendidikan modern, salah satu dari lima fungsi pendidikan adalah fungsi teknis-ekonomis baik pada tataran individual hingga tataran global. Fungsi teknis-ekonomis merujuk pada kontribusi pendidikan untuk perkembangan ekonomi. Misalnya pendidikan dapat membantu siswa untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk hidup dan berkompetisi dalam ekonomi yang kompetitif.

Secara umum terbukti bahwa semakin berpendidikan seseorang maka tingkat pendapatannya semakin baik. Hal ini dimungkinkan karena orang yang berpendidikan lebih produktif bila dibandingkan dengan yang tidak berpendidikan. Produktivitas seseorang tersebut dikarenakan dimilikinya keterampilan teknis yang diperoleh dari pendidikan. Oleh karena

itu salah satu tujuan yang harus dicapai oleh pendidikan adalah mengembangkan keterampilan hidup. Inilah sebenarnya arah kurikulum berbasis kompetensi, pendidikan *life skill* dan *broad based education* yang dikembangkan di Indonesia akhir-akhir ini. Di Amerika Serikat (1992) seseorang yang berpendidikan doktor penghasilan rata-rata per tahun sebesar 55 juta dollar, master 40 juta dollar, dan sarjana 33 juta dollar. Sementara itu lulusan pendidikan lanjutan hanya berpenghasilan rata-rata 19 juta dollar per tahun. Pada tahun yang sama struktur ini juga terjadi di Indonesia. Misalnya rata-rata, antara pedesaan dan perkotaan, pendapatan per tahun lulusan universitas 3,5 juta rupiah, akademi 3 juta rupiah, SLTA 1,9 juta rupiah, dan SD hanya 1,1 juta rupiah.

Para penganut teori *human capital* berpendapat bahwa pendidikan adalah sebagai investasi sumber daya manusia yang memberi manfaat moneter ataupun non-moneter. Manfaat non-moneter dari pendidikan adalah diperolehnya kondisi kerja yang lebih baik, kepuasan kerja, efisiensi konsumsi, kepuasan menikmati masa pensiun dan manfaat hidup yang lebih lama karena peningkatan gizi dan kesehatan. Manfaat moneter adalah manfaat ekonomis yaitu berupa tambahan pendapatan seseorang yang telah menyelesaikan tingkat pendidikan tertentu dibandingkan dengan pendapatan lulusan pendidikan dibawahnya (Walter W. McMahon dan Terry G. Geske: 1982).

Sumber daya manusia yang berpendidikan akan menjadi modal utama pembangunan nasional, terutama untuk perkembangan ekonomi. Semakin banyak orang yang berpendidikan maka semakin mudah bagi suatu negara untuk membangun bangsanya. Hal ini dikarenakan telah dikuasainya

keterampilan, ilmu pengetahuan dan teknologi oleh sumber daya manusianya sehingga pemerintah lebih mudah dalam menggerakkan pembangunan nasional.

**Kedua**, investasi pendidikan memberikan nilai balik (*rate of return*) yang lebih tinggi dari pada investasi fisik di bidang lain. Nilai balik pendidikan adalah perbandingan antara total biaya yang dikeluarkan untuk membiayai pendidikan dengan total pendapatan yang akan diperoleh setelah seseorang lulus dan memasuki dunia kerja. Di negara-negara sedang berkembang umumnya menunjukkan nilai balik terhadap investasi pendidikan relatif lebih tinggi dari pada investasi modal fisik yaitu 20 % dibanding 15 %. Sementara itu di negara-negara maju nilai balik investasi pendidikan lebih rendah dibanding investasi modal fisik yaitu 9 % dibanding 13 %. Keadaan ini dapat dijelaskan bahwa dengan jumlah tenaga kerja terdidik yang terampil dan ahli di negara berkembang relatif lebih terbatas jumlahnya dibandingkan dengan kebutuhan sehingga tingkat upah lebih tinggi dan akan menyebabkan nilai balik terhadap pendidikan juga tinggi (Ace Suryadi :1999: 247).

Pilihan investasi pendidikan juga harus mempertimbangkan tingkatan pendidikan. Di Asia nilai balik sosial pendidikan dasar rata-rata sebesar 27 %, pendidikan menengah 15 %, dan pendidikan tinggi 13 %. Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka manfaat sosialnya semakin kecil. Jelas sekali bahwa pendidikan dasar memberikan manfaat sosial yang paling besar diantara tingkat pendidikan lainnya. Melihat kenyataan ini maka struktur alokasi pembiayaan pendidikan harus direformasi. Pada tahun 1995/1996 misalnya, alokasi biaya pendidikan dari pemerintah Indonesia untuk Sekolah Dasar Negeri per

siswa paling kecil yaitu rata-rata hanya sekitar 18.000 rupiah per bulan, sementara itu biaya pendidikan per mahasiswa di Perguruan Tinggi Negeri mendapat alokasi sebesar 66.000 rupiah per bulan. Dirjen Dikti (Satrio Sumantri Brojonegoro) suatu ketika mengemukakan bahwa alokasi dana untuk pendidikan tinggi negeri 25 kali lipat dari pendidikan dasar. Hal ini menunjukkan bahwa biaya pendidikan yang lebih banyak dialokasikan pada pendidikan tinggi justru terjadi inefisiensi karena hanya menguntungkan individu dan kurang memberikan manfaat kepada masyarakat.

Reformasi alokasi biaya pendidikan ini penting dilakukan mengingat beberapa kajian yang menunjukkan bahwa mayoritas yang menikmati pendidikan di PTN adalah berasal dari masyarakat mampu. Maka model pembiayaan pendidikan selain didasarkan pada jenjang pendidikan (dasar atau tinggi) juga didasarkan pada kekuatan ekonomi siswa (miskin atau kaya). Artinya siswa di PTN yang berasal dari keluarga kaya harus dikenakan biaya pendidikan yang lebih mahal dari pada yang berasal dari keluarga miskin. Model yang ditawarkan ini sesuai dengan kriteria *equity* dalam pembiayaan pendidikan seperti yang digariskan Unesco.

Itulah sebabnya Profesor Kinoshita menyarankan bahwa yang lebih diperlukan di Indonesia adalah pendidikan dasar yang cangguh. Proses pendidikan dasar setidaknya bertumpu pada empat pilar yaitu *learning to know*, *learning to do*, *learning to be*, dan *learning to live together* yang dapat dicapai melalui delapan kompetensi dasar yaitu membaca, menulis, mendengar, menutur, menghitung, meneliti, menghafal dan menghayal. Anggaran pendidikan nasional seharusnya diprioritaskan untuk mengentaskan pendidikan dasar 9 tahun

dan bila perlu diperluas menjadi 12 tahun. Selain itu pendidikan dasar seharusnya “benar-benar” dibebaskan dari segala beban biaya. Dikatakan “benar-benar” karena selama ini wajib belajar 9 tahun yang dicanangkan pemerintah tidaklah gratis. Apabila semua anak usia pendidikan dasar sudah terlayani mendapatkan pendidikan tanpa dipungut biaya, barulah anggaran pendidikan dialokasikan untuk pendidikan tingkat selanjutnya.

**Ketiga**, investasi dalam bidang pendidikan memiliki banyak fungsi selain fungsi teknis-ekonomis yaitu fungsi sosial-kemanusiaan, fungsi politis, fungsi budaya, dan fungsi kependidikan. Fungsi sosial-kemanusiaan merujuk pada kontribusi pendidikan terhadap perkembangan manusia dan hubungan sosial pada berbagai tingkat sosial yang berbeda. Misalnya pada tingkat individual pendidikan membantu siswa untuk mengembangkan dirinya secara psikologis, sosial, fisik dan membantu siswa mengembangkan potensinya semaksimal mungkin (Yin Cheong Cheng : 1996).

Fungsi politis merujuk pada sumbangan pendidikan terhadap perkembangan politik pada tingkatan sosial yang berbeda. Misalnya pada tingkat individual, pendidikan membantusiswauntukmengembangkan sikap dan keterampilan kewarganegaraan yang positif untuk melatih warganegara yang benar dan bertanggung jawab. Orang yang berpendidikan diharapkan lebih mengerti hak dan kewajibannya sehingga wawasan dan perilakunya semakin demokratis. Selain itu orang yang berpendidikan diharapkan memiliki kesadaran dan tanggung jawab terhadap bangsa dan negara lebih baik dibandingkan dengan yang kurang berpendidikan.

Fungsi budaya merujuk pada sumbangan pendidikan pada peralihan dan perkembangan budaya pada tingkatan sosial

yang berbeda. Pada tingkat individual, pendidikan membantu siswa untuk mengembangkan kreativitasnya, kesadaran estetis serta untuk bersosialisasi dengan norma-norma, nilai-nilai dan keyakinan sosial yang baik. Orang yang berpendidikan diharapkan lebih mampu menghargai atau menghormati perbedaan dan pluralitas budaya sehingga memiliki sikap yang lebih terbuka terhadap keanekaragaman budaya. Dengan demikian semakin banyak orang yang berpendidikan diharapkan akan lebih mudah terjadinya akulturasi budaya yang selanjutnya akan terjadi integrasi budaya nasional atau regional.

Fungsi kependidikan merujuk pada sumbangan pendidikan terhadap perkembangan dan pemeliharaan pendidikan pada tingkat sosial yang berbeda. Pada tingkat individual pendidikan membantu siswa belajar cara belajar dan membantu guru cara mengajar. Orang yang berpendidikan diharapkan memiliki kesadaran untuk belajar sepanjang hayat (*life long learning*), selalu merasa ketinggalan informasi, ilmu pengetahuan serta teknologi sehingga terus terdorong untuk maju dan terus belajar.

Di kalangan masyarakat luas juga berlaku pendapat umum bahwa semakin berpendidikan maka makin baik status sosial seseorang dan penghormatan masyarakat terhadap orang yang berpendidikan lebih baik dari pada yang kurang berpendidikan. Orang yang berpendidikan diharapkan bisa menggunakan pemikiran-pemikirannya yang berorientasi pada kepentingan jangka panjang. Orang yang berpendidikan diharapkan tidak memiliki kecenderungan orientasi materi atau uang apalagi untuk memperkaya diri sendiri.

Semenjak para ahli ekonomi dan pendidik memperhitungkan

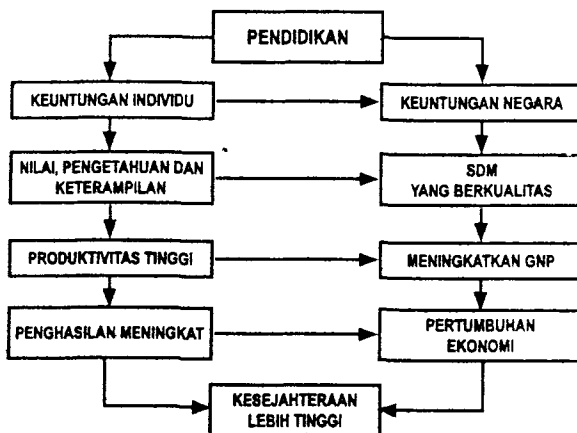


bahwa "*capital*" itu bukan sekedar yang bersifat fisik dan finansial tetapi juga *less tangible* berupa manusia, maka segala upaya untuk meningkatkan produktivitas pekerja diistilahkan dengan *human capital investment*.

Pengembalian modal dan keuntungan investasi pendidikan pada hakikatnya didapat melalui pasar tenaga kerja. Melalui pendidikan seseorang dapat membekali diri dan menerapkan segala kemampuannya. Hal ini akan meningkatkan produktivitas mereka dalam bekerja. Schultz (1954) dan Becker (1993) menyatakan bahwa nilai keuntungan investasi pendidikan itu merupakan aktualisasi dari nilai produktivitas *marginal* seseorang. Model dasar teori ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Dalam kerangka individual dan negara, investasi dalam pendidikan dapat digambarkan dengan model berikut :



Berdasarkan bagan di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan, produktivitas dan pertumbuhan ekonomi merupakan variabel yang saling berkaitan. Keberadaan *qualified human capital* sangatlah penting jika dibanding dengan *physical and material capital*.

### C. Permasalahan Pendidikan di Indonesia

Walaupun telah banyak yang dilakukan oleh bangsa dan pemerintah Indonesia, namun harus diakui bahwa pencapaian pembangunan pendidikan masih jauh dari yang diharapkan, terutama bila dibandingkan dengan negara-negara lain. Permasalahan yang secara klise dihadapi adalah mutu, relevansi, efisiensi dan pemerataan. Banyak sekali contoh yang dapat dikemukakan terkait dengan keempat permasalahan tersebut. Namun pertanyaan yang lebih penting untuk dikemukakan terkait dengan tema artikel ini adalah “Apakah yang salah dalam pendidikan kita selama ini?”.

**Pertama**, kesalahan asumsi yang memandang pendidikan memiliki fungsi nasional untuk menjadi landasan kuat bagi persatuan bangsa dan melanggengkan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena itu pendidikan dikelola secara sentralistik dan dipelihara gaya birokratiknya yang kental. Pendidikan diposisikan sekedar menjadi subordinat dari sistem politik dan kekuasaan.

**Kedua**, wawasan sumber daya manusia yang berkualitas, berhenti pada retorika saja karena tidak disertai dengan visi, komitmen dan keahlian *policy maker*. Tidak ada tanda-tanda yang signifikan dari *quality education*, tidak dari *strategic management*, tidak juga dari *total quality management*.

**Ketiga**, orientasi pendidikan lebih banyak menciptakan

“pencari kerja” dari pada pekerja mandiri. Kecenderungan mentalitas pegawai birokrat pada lulusan sekolah, menjadi mereka hanya mencari pekerjaan dan hanya bekerja bila mendapatkan perintah atau petunjuk (Tilaar, 1998). Ace Suryadi dan Tilaar (1993:140) menunjukkan bahwa 84% lulusan SLTA dan 91% lulusan perguruan tinggi berstatus sebagai “pekerja” (*employee*). Lulusan sarjana baru setiap tahunnya lebih dari 300.000 orang langsung masuk ke pasar kerja beserta para lulusan tahun lalu yang belum kerja atau tidak cocok dengan pekerjaan yang didapatkan ditambah lagi para pencari kerja dari strata pendidikan lainnya. Akibatnya, banyak terjadi pengangguran dan sangat disayangkan makin banyaknya terjadi pengangguran terdidik.

Selain ketiga kesalahan tersebut, senat IKIP Bandung (1998) mengidentifikasi 7 kelemahan sistem pendidikan nasional yang selama ini berjalan, yaitu (1) Kekaburan misi dan tujuan pendidikan, (2) Kelemahan manajemen sistem pendidikan, (3) Suasana dan kondisi kerja yang kurang mendukung, (4) Kurangnya otonomi dalam bidang pendidikan, (5) Tidak terintegrasinya sekolah, persekolahan dengan pendidikan luar sekolah, (6) Alokasi dan pemanfaatan sumber daya dan dana pendidikan, dan (7) Pengawasan yang lemah.

Kesalahan dan kelemahan tersebut kiranya dapat menjelaskan mengapa kemajuan kuantitatif pendidikan yang selama ini terjadi tidak mampu memberikan kontribusi terhadap produktivitas nasional. Dari sini maka permasalahan strategis pendidikan dalam menghadapi tantangan masa depan dikemukakan oleh M. Fakry Gaffar (1998) sebagai berikut:

- 1) Landasan dan tujuan yang pasti dan jelas yang berbeda dari landasan dan tujuan pada era pembangunan

pendidikan sebelumnya.

- 2) *Learning needs* siswa yang terus berubah dan berkembang dengan pesat, yang harus difahami dan dijadikan bahan untuk menetapkan *learning content* dan *learning materials* dalam proses pembelajaran.
- 3) Isi pendidikan yang menentukan lingkup dan kedalaman proses belajar yang diorganisasi dalam sistem kurikulum tertentu.
- 4) Peran guru yang jelas sehingga tidak kabur di tengah kemajuan sains dan teknologi.
- 5) Manajemen proses yang menentukan tingkat efisiensi pencapaian pendidikan dan menentukan profesionalisme yang harus diterapkan dalam upaya memperbaiki dan menyempurnakan pengelola pendidikan.
- 6) Penyediaan dan penggalan sumber-sumber daya yang mendukung proses pembelajaran.

#### **D. Pendidikan Bermutu Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi Bangsa**

Memasuki era globalisasi yang ditandai dengan menguatnya ekonomi neoliberal, keunggulan ilmu pengetahuan menjadi faktor dominan dalam mendorong percepatan kemajuan suatu bangsa. Dinamika perkembangan ekonomi yang digerakkan ilmu pengetahuan itu secara teknis disebut *knowledge driven economic growth*, yang menempatkan lembaga pendidikan khususnya jenjang pendidikan tinggi pada posisi yang amat penting dan strategis sebab dapat :

- 1) Melahirkan tenaga-tenaga kerja terlatih, kompetitif, dan adaptif seperti profesional, pakar, teknisi, dan

manajer.

- 2) Melahirkan ilmu pengetahuan baru dan menciptakan inovasi teknologi.

- 3) Meningkatkan kemampuan mengakses perkembangan ilmu pengetahuan pada level global dan mengadaptasinya menurut konteks lokal (Bank Dunia, dalam Amich Alhumami, 2005).

Harbison dan Myere (1984) menyatakan bahwa pendidikan pada dasarnya merupakan sarana dan cara utama yang paling strategis bagi pengembangan sumber daya manusia, baik melalui pendidikan formal, non-formal atau investasi formal.

Vaizey mengemukakan bahwa pendidikan memberikan kontribusi bagi kemajuan ekonomi dalam tiga hal, yaitu :

- 1) Menyediakan tenaga terlatih dan teknisi yang dapat mengubah nilai ekonomi dari modal fisik.
- 2) Menciptakan *a climate for growth*, dengan memberikan pada masyarakat suatu kemampuan untuk memikirkan lebih jauh dari sekedar kebutuhan dan problem yang dihadapi saat ini.
- 3) Mengajarkan keterampilan yang sederhana bagi para petani agar dapat meningkatkan hasil melebihi kebutuhan konsumsinya sehingga memiliki sisa sebagai cadangan atau modal.

Untuk dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi, maka lembaga pendidikan pada semua jenjang dan jalur pendidikan perlu menerapkan :

- 1) Kurikulum yang memberikan bekal pengalaman kepada peserta didik sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat.

- 2) Lingkup materi (ilmu pengetahuan dan teknologi) mengarah pada pencapaian kompetensi produktif pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
- 3) Sifat holistik kurikulum memberikan arah pemahaman dan atau penghayatan akan potensi wilayah sesuai dengan peluang dan tantangan ekonomi.
- 4) Materi pembentukan sikap mental wiraswasta menjadi keharusan bagi peserta didik pada setiap jenis dan jenjang pendidikan.
- 5) Proses pembelajaran memberikan pengalaman bermakna bagi peserta didik dalam arti riil dan relevan dengan konteks kehidupan.
- 6) Proses pembelajaran didukung oleh fasilitas yang memadai untuk memberikan keterampilan dan keahlian yang akan diwujudkan.
- 7) Penilaian dilakukan untuk melihat tingkat kompetensi produktif peserta didik.
- 8) Kompetensi produktif lulusan menjadi indikator keberhasilan pendidikan.
- 9) Sistem penilaian berbasis kompetensi dikembangkan menjadi sistem yang harus dilaksanakan pada setiap jenis dan jenjang pendidikan (Joko Widodo : 2008)

Kita meyakini dan menyadari bahwa pendidikan tinggi memberi kontribusi yang besar pada kemajuan ekonomi bangsa. Untuk itu, peran pendidikan tinggi perlu ditingkatkan secara maksimal sehingga dapat menjadi kekuatan pendorong bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Karena itu, strategi baru perlu dirumuskan oleh pendidikan tinggi agar dapat menghadapi tantangan perkembangan global. Menurut Zumeta & Stephens (dalam Amich Alhumami) ada enam strategi yang perlu

diterapkan agar pendidikan tinggi mampu menjadi kekuatan penggerak perkembangan ekonomi, yaitu :

- 1) Membuat program bantuan manajemen dan teknis yang berbasis di kampus guna menyemai potensi bisnis dan kewirausahaan. Program ini penting sebagai sarana dan wadah bagi pemupukan dan pengembangan talenta berbisnis dan berwirausaha sehingga mahasiswa bisa mengenal tradisi berniaga sejak awal. Pemerintah Indonesia pada tahun 2009 akan menyediakan dana sebesar Rp. 110 miliar untuk mengembangkan pendidikan kewirausahaan di perguruan tinggi. Dengan pendidikan kewirausahaan tersebut, diharapkan para lulusan perguruan tinggi tidak hanya mencari kerja, tetapi bisa sebagai pencipta lapangan kerja. Ini sesuai dengan asumsi bahwa keberhasilan seseorang bukan ditentukan oleh kepandaian yang dipunyai, akan tetapi oleh faktor lainnya yang sangat penting. Tingkat kecerdasan kira-kira hanya menyumbang 20-30 persen keberhasilan, selebihnya ditentukan oleh *soft skills*. Penelitian NACE (*National Association of Colleges and Employers*) pada tahun 2005 menunjukkan bahwa penggunaan tenaga kerja membutuhkan keahlian kerja berupa 82 % *soft skills* dan 18 % *hard skills* (misal indeks prestasi yang tinggi). *Soft skills* adalah tingkah laku personal dan interpersonal yang dapat mengembangkan dan memaksimumkan kinerja seseorang manusia (misal pelatihan, pengembangan kerja sama tim, inisiatif, pengambilan keputusan dll). Dengan demikian kemampuan *soft skills* tercermin

dalam perilaku seseorang yang memiliki kepribadian, sikap dan perilaku yang dapat diterima dalam kehidupan bermasyarakat. Selaras dengan kemampuan *soft skills*, maka mahasiswa perlu dibekali dengan pendidikan kemampuan kewirausahaan yang handal. Dengan dibekali pengetahuan kewirausahaan yang memadai dan disertai segi-segi prakteknya, maka para lulusan mempunyai kemauan dan kemampuan yang memadai, sehingga tidak merasa kebingungan ketika harus memasuki pasaran kerja. Joseph Schumpeter sebagai pakar ekonomi kelembagaan berpendapat kewirausahaan sangat penting dalam menentukan kemajuan perekonomian suatu negara. Pemikirannya bertumpu pada ekonomi jangka panjang yang terlihat dalam analisisnya baik mengenai terjadinya invensi dan inovasi penemuan-penemuan baru yang dapat menentukan pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

- 2) Membuat program guna memantapkan dan mempercepat proses alih teknologi dari pusat-pusat penelitian perguruan tinggi ke dunia industri dan sebaliknya. Melalui program ini, transmisi dan difusi teknologi semakin mudah dilakukan sehingga masing-masing bisa lebih cepat mengadopsi dan menyesuaikan dengan perkembangan teknologi mutakhir.
- 3) Perguruan tinggi dan dunia industri bekerja sama dalam menyelenggarakan pelatihan kerja bagi (calon) tenaga kerja. Di negara maju, program ini lazim disebut *cooperative education*, yakni aktivitas akademik di perguruan tinggi yang terintegrasi dengan lembaga-



lembaga swasta (bisnis dan industri). Program ini penting untuk memberi bekal pengalaman bekerja di kalangan mahasiswa sehingga memudahkan mereka dalam merintis dan mengembangkan karier di masa depan.

- 4) Pemerintah menyediakan bantuan dana bagi pengembangan program tertentu guna mempererat kerja sama perguruan tinggi dan dunia industri. Program ini bisa dilakukan melalui pembuatan proyek rintisan di bidang tertentu berdasarkan keunggulan masing-masing universitas atau institut. Jadi perguruan tinggi perlu menciptakan keunggulan kompetitif yang dilandasi oleh kompetensi inti dari perguruan tinggi masing-masing. Contoh : IPB unggul di bidang teknologi pertanian, ITB unggul di bidang teknologi industri, atau ITS dominan di bidang ilmu kelautan, mereka bisa menjalin kerja sama dengan perusahaan di ketiga bidang itu.
- 5) Membangun "inkubator bisnis" yang disubsidi dan berbasis di kampus, yang bertujuan memupuk dan mengembangkan industri baru di bidang tertentu yang didukung sepenuhnya ahli-ahli berkompeten di perguruan tinggi dan fasilitas yang memadai. Program ini penting dan perlu dilakukan guna membangun sinergi antara kompetensi dan keahlian yang dimiliki perguruan tinggi dengan pengalaman profesional yang dipunyai lembaga bisnis dan industri. Pada sekolah maupun kampus bisa juga didirikan berbagai gerai seperti penjual makanan, simpan pinjam, jasa tiket transportasi, perbankan, kursus bahasa asing

dan sebagainya. Para mahasiswa secara bergantian mendapat tugas berpraktek di sini dengan target-target yang telah ditentukan, supaya terbiasa bekerja dengan perencanaan dengan target yang sudah ditentukan.

- 6) Membangun lembaga riset tangguh yang disubsidi dan berbasis di kampus, yang ditujukan untuk menarik pengusaha dan dunia industri agar bersedia memanfaatkan jasa yang disediakan perguruan tinggi. Program ini amat fundamental dan bersifat strategis guna memantapkan peran lembaga *research and development* yang menjadi jantung kemajuan perguruan tinggi dan memberi manfaat besar bagi dunia industri.

## E. PENUTUP

Dari uraian tentang peranan pendidikan dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi, berikut ini dikemukakan kesimpulannya sebagai berikut :

- 1) Pertumbuhan ekonomi yang ideal adalah yang ditopang oleh peningkatan produktivitas seluruh lapisan masyarakat.
- 2) Sumber daya manusia atau "*human capital*" merupakan faktor yang paling penting di samping sumber daya alam dan jenis kapital lainnya.
- 3) Pendidikan di Indonesia selama ini tidak banyak meningkatkan produktivitas masyarakat, karena terdapat kesalahan-kesalahan dalam asumsi dan pengelolaan.
- 4) Untuk memperbaiki pendidikan guna menghadapi masa depan, maka perlu diperhatikan permasalahan strategis

meliputi landasan dan tujuan pendidikan, *learning needs*, isi dan proses belajar, peranan guru, efisiensi dan profesionalisme manajemen dan penyediaan dan penggalan sumber daya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ace Suryadi dan Tilaar. 1993. *Analisis Kebijakan Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Ahmad Sanusi. 1998. *Pendidikan Alternatif*. Bandung: PPS IKIP Bandung dan Grafindo Media Pratama.
- Amich Alhumami. *Pendidikan dan Pembangunan Ekonomi*.  
<http://64.203.71.11/kompas.cetak/0505/03/opini/1724824.htm> (17 September 2008).
- \_\_\_\_\_. *Pendidikan Tinggi dan Pembangunan Ekonomi*.  
<http://64.203.71.11/kompas.cetak/0505/03/opini/1724824.htm> (17 September 2008).
- Becker G.S. 1993. *Human Capital A Theoretical and Empirical Analysis with Special Reference to Education*. Chicago: The University of Chicago.
- Cohn, E. 1979. *The Economic of Education*. USA: Ballinger Pub.Co.
- Harbinson dan Myers. 1964. *Education Manpower and Economic Growth: Strategies of Human Resources*.
- Johns, Morphet dan Alexander. 1984. *The Economic and Financing of Education*. New Jersey: Prentice – Hall Inc.
- M. Fakry Gaffar. 1998. *Pendidikan Indonesia: Tantangan dan Strategi dari Masa Krisis Hingga Millenium Ketiga*. Makalah disajikan pa-da Seminar Nasioanal Pendidikan

- di Jakarta, tanggal 15-16 Desember 1998.
- Nafziger. 1984, *The Economic of Developing Countries*. Belmont, Cali-fornia: Wadsworth Inc.
- Nurcholis. *Pendidikan Sebagai Investasi Jangka Panjang*. <http://researchengines.com/nurkolis5.htm>. (25 Desember 2008).
- Senat IKIP Bandung. 1998. *Reformasi Pendidikan: Dasar dan Akselerator Keberhasilan Reformasi dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bangsa*.
- Soedijarto. 1997. *Memantapkan Kinerja Sistem Pendidikan Nasional dalam Menyiapkan Manusia Indonesia Memasuki Abad ke-21*. Jakarta: Depdikbud RI.
- Tilaar, HAR. 1998. *Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional*. Magelang: Tera Indonesia.
- Vaizey, J. 1962. *The Economics of Education*. London: Faber and Faber.
- Widodo, Joko. 2008. *Bahan Kuliah Mata Kuliah Ekonomi Pendidikan*. Semarang: Universitas Negeri Semarang.